

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan salah satu aset sebuah organisasi yang memiliki nilai tertentu bagi suatu organisasi sehingga hal tersebut sudah sewajarnya harus dilindungi. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk menjamin keberlangsungan bisnis suatu organisasi. Selain itu, perlindungan informasi menjadi penting untuk meminimalisir adanya kebocoran data yang menyebabkan kerugian bagi suatu organisasi. Semakin banyak informasi organisasi yang disimpan, dikelola dan dibagikan maka semakin besar pula resikonya, kehilangan atau tereksposnya data ke pihak eksternal yang tidak diinginkan. Pengamanan informasi suatu organisasi menjadi penting dilakukan untuk menghindari resiko yang ada. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk melindungi informasi organisasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan kebijakan atau suatu prosedur untuk mengelola suatu informasi dan menjamin kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan aset - aset informasi yang sekaligus dapat meminimalkan resiko keamanan informasi.

Standar yang umum digunakan oleh suatu organisasi untuk menjamin informasinya adalah ISO 27001. ISO 27001 secara resmi menetapkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan informasi. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk mengelola data sensitif organisasi secara sistematis (Kominfo, 2019). Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu instansi yang menerapkan standar ISO 27001 pada sistem manajemen keamanan informasinya

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan

Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 (Kominfo, 2019). Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memegang peran penting dalam melaksanakan rumpunan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang selaras dengan pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi di era digital. Maka, informasi yang ada di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menjadi aset penting yang perlu perlindungan khusus. Pada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur terdapat struktur organisasi yang terdiri dari beberapa sekretariat dan bidang. Salah satu bidang yang memiliki peran penting pada pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi adalah Bidang Aplikasi dan Informatika. Pada bidang ini terbagi menjadi tiga seksi yaitu Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Seksi Pengembangan Aplikasi; dan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

Bidang APTIKA memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasionalnya untuk saling terhubung antar seksi lainnya sehingga dapat meningkatkan penerapan prosedur dan metodologi secara konsisten. Pada bidang ini, memegang peran penting dalam manajemen keamanan informasi. Namun dalam pengimplementasian Manajemen Keamanan Informasi masih terdapat masalah atau kekurangan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan dan pedoman untuk mengupayakan keamanan informasi. Kurang maksimalnya pelaksanaan ini, dapat mengakibatkan SMKI mendapatkan resiko yang lebih besar.

Sesuai dengan masalah yang ditemukan tersebut maka diperlukan adanya evaluasi manajemen keamanan informasi pada Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Tata kelola dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) merupakan bagian yang terintegrasi dari pengelolaan organisasi yang mencakup struktur serta proses instansi yang memastikan bahwa keamanan informasi dimanfaatkan sebaik mungkin. Proses evaluasi manajemen keamanan informasi dapat menggunakan beberapa perangkat (*tools*) maupun pendekatan yang bisa dijadikan referensi dalam melakukan evaluasi. Salah satunya yang dapat mengukur kapabilitas manajemen keamanan informasi adalah COBIT 5.

Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) merupakan sebuah *framework* atau *best practice* untuk manajemen TI yang diterbitkan oleh *Information System Audit and Control Association* (ISACA).

Penelitian ini menggunakan COBIT 5 karena diyakini dapat memberikan pemisah yang jelas antara proses-proses dalam lingkup manajemen dan tata kelola. Pada COBIT 5 sendiri terdapat berbagai domain dengan *capability level* sebagai acuan tingkat pengukuran. Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini, domain khusus yang digunakan adalah *Align, Plan and Organize* sebagai acuan dari COBIT 5. APO13 merupakan salah satu sub-domain yang ada pada COBIT 5 yang memiliki 19 *activities* sebagai tolak ukur kerangka kerja yang akan digunakan pada penelitian ini. Dari uraian yang telah dijabarkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat menemukan kekurangan penerapan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur dan dari temuan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Capability Level* Manajemen Keamanan Informasi pada Bidang APTIKA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggunakan *Framework* COBIT 5 fokus proses APO13?
2. Bagaimana *Gap Analysis* antara pencapaian saat ini dengan tingkat yang ingin dicapai oleh Bidang APTIKA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur?
3. Apa saja rekomendasi peningkatan manajemen keamanan informasi pada Bidang APTIKA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil pengukuran menggunakan COBIT 5?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian yang dilakukan pada pelaksanaan PKL ini terdapat beberapa batasan diantaranya :

1. Penelitian ini menggunakan COBIT 5 fokus proses APO13 *Manage Security*
2. Ruang lingkup penelitian ini adalah Bidang APTIKA Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL ini di antara lain :

1. Menilai sejauh mana tingkat kapabilitas atau *Capability Level* Manajemen Keamanan Informasi di Bidang APTIKA Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.
2. Mengetahui nilai kesenjangan atau *gap* antara pencapaian saat ini dengan tingkat yang ingin dicapai oleh Bidang APTIKA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
3. Memberikan rekomendasi peningkatan manajemen keamanan informasi berdasarkan COBIT 5.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari pelaksanaan PKL ini adalah :

1. Mengetahui tingkat kapabilitas dari perspektif internal Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur tentang Manajemen Keamanan Informasi.
2. Mengetahui kekurangan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam Manajemen Keamanan Informasi.
3. Menjadi referensi dalam melakukan perbaikan untuk peningkatan Manajemen Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.